

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena kemiskinan perdesaan bukan merupakan suatu gejala yang baru. Secara absolut jumlah penduduk Indonesia yang masih hidup dibawah garis kemiskinan masih menunjukkan angka yang relatif besar. Berdasarkan data Badan statistik bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 28,01 juta orang (10,86 persen) pada bulan Maret 2016. Dari jumlah tersebut 62,75 persen berada di daerah perdesaan. Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2016 meningkat yakni 14,11 persen dari 14.09 persen pada September 2015.¹ Pemicu dari peningkatan angka kemiskinan tersebut disebabkan dari usaha pertanian yang menurun.²

Kemiskinan di pedesaan akan terus menjadi masalah pokok nasional hingga penanggulangan kemiskinan tetap menjadi program prioritas untuk tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin.³ Paradigma inilah yang menjadikan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) telah menjadi bagian institusi keuangan yang tak terpisahkan dari sistem keuangan negara kita karena keberadaannya sangat dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah.

Lembaga keuangan Mikro (LKM) semakin berkembang di pedesaan maupun di perkotaan, mulai dari yang formal (dukungan pemerintah), semi formal hingga yang non formal atau informal. Orientasi LKM lebih ditunjukan

¹BPS, (2016), Jumlah Penduduk Miskin Maret 2016 Mencapai 10,86 persen ,(online),Tersedia:<https://www.bps.go.id/brs/view/id/1229> (10 Desember 2017).

² Henry Saragih, (2016), Profil Kemiskinan di Indonesia 2016: Dalam Angka Berkurang, Namun di Desa Makin Dalam dan Parah, Tersedia: <https://www.spi.or.id/profil-kemiskinan-di-indonesia-2016-dalam-angka-berkurang-namun-di-desa-makin-dalam-dan-parah/> (10 Desember 2017)

³ Menteri Pertanian Republik Indonesia, *Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan*, Jakarta, 2015, hlm. 1.

pada usaha ekonomi non pertanian, sedangkan LKM yang melayani permodalan di sektor pertanian jumlahnya masih terbatas.⁴

LKM kembali dijadikan sarana pemberdayaan bagi Kelompok Tani penerima Penguatan Modal usaha kelompok oleh Pusat Pembiayaan Pertanian. Label Agribisnis pun disematkan sehingga menjadi LKM Agribisnis. Kementerian Pertanian menyatakan bahwa kegiatan LKM-A terus dikembangkan sebagai wahana pengelolaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan program terobosan Kementerian Pertanian untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengangguran. PUAP merupakan bentuk fasilitas modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Sehingga, keberadaan LKM-A dalam PUAP menjadi keharusan untuk mengelola keuangan Gapoktan.⁵

Seluruh LKM-A dalam Gapoktan mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengembangkan kegiatan usaha agribisnis dan menjadi mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan pertanian. Hal ini mengandung arti bahwa untuk mencapai tujuan tersebut maka pengelolaan LKM-A dalam Gapoktan harus dilakukan dengan akuntabel dan transparan.

Pertumbuhan aset dapat dijadikan tolak ukur kinerja dari pengelolaan LKM-A dalam Gapoktan. Apabila terjadi penurunan jumlah aset atau terjadinya pertumbuhan aset yang kurang signifikan, ini menunjukkan buruknya pengelolaan LKM-A Gapoktan.

Jumlah aset yang menurun atau tidak adanya pertumbuhan aset secara signifikan memiliki sejumlah implikasi. Hal tersebut menjadikan kumulatif penyaluran pinjaman bagi petani menjadi menurun. Sehingga tujuan dari

⁴ Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, *Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)*, Kalimantan Timur, 2010, hlm. 1.

⁵ Menteri Pertanian Republik Indonesia. *Loc. Cit.*

program PUAP yaitu meningkatkan skala ekonomi bagi petani tidak akan tercapai dengan maksimal.

Di Kecamatan Wedarijaksa sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016, sebanyak 8 Gapoktan menjadi pelaksana program PUAP dengan jumlah dana BLM yang telah disalurkan sejumlah 800 juta rupiah. Potensi pemberdayaan ekonomi petani dan pengembangan agribisnis melalui penyaluran dana BLM-PUAP merupakan suatu tantangan bagi semua pihak terkait dari pusat sampai ke daerah, khususnya bagi gapoktan sebagai pelaksana utama Program PUAP di lapangan.

Tabel 1.1
Jumlah dan Persentase Kenaikan Dana Gapoktan Margo Tani dan Makmur Lestari

NAMA GAPOKTAN	JUMLAH						KENAIKAN					
	(JUTAAN)						(PERSENTASE)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MARGO TANI	100	102	105	105	110	113	0.00	2.00	2.94	0.00	4.76	2.73
MAKMUR LESTARI	-	-	-	100	143	183	-	-	-	0.00	43.0	27,97

Sumber :Data primer

LKM-A Gapoktan Makmur Lestari dan LKM-A Gapoktan Margo Tani termasuk kedalam 8 Gapoktan di Kecamatan Wedarijaksa yang mendapatkan dana PUAP. Tabel diatas menggambarkan bahwa ada temuan dalam hal pertumbuhan aset antara kedua Gapoktan tersebut dimana pertumbuhan aset LKM-A Gapoktan Makmur Lestari dari tahun ke tahun lebih baik dibandingkan dengan LKM-A Gapoktan Margo Tani. Hal ini menarik untuk dikaji dengan melihat bahwa LKM-A Gapoktan Makmur Lestari terbentuk di tahun 2014. Sedangkan LKM-A Gapoktan Margo Tani terbentuk 3 tahun sebelumnya. Tetapi jika dilihat dari segi pertumbuhan asetnya, pertumbuhan aset LKM-A Gapoktan Makmur Lestari lebih baik daripada LKM-A Gapoktan Margo Tani.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Analisis Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Gapoktan Makmur Lestari dan Gapoktan Margo Tani Kecamatan Wedajaksa Kabupaten Pati.**

B. Fokus Penelitian

Ada tiga aspek dalam penilaian Gapoktan menuju Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) yaitu organisasi Gapoktan, Manajemen Pengelolaan LKM-A, dan Kinerja Pengelolaan LKM-A.

Agar penelitian pada skripsi ini fokus pada persoalan yang dimunculkan, maka penulis membatasi penelitian hanya pada manajemen pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Gapoktan.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan di dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana praktik pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Gapoktan pada Makmur Lestari?
2. Bagaimana praktik pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Gapoktan Margo Tani?
3. Bagaimana perbandingan antara pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Gapoktan Makmur Lestari dengan Margo Tani?
4. Apa kendala yang dihadapi LKM-A Gapoktan Makmur Lestari dan LKM-A Gapoktan Margo Tani dalam pengelolaannya dan solusinya?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui praktik pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Gapoktan pada Makmur Lestari.
2. Mengetahui praktik pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Gapoktan Margo Tani.

3. Mengetahui perbedaan pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Gapoktan Makmur Lestari dan Margo Tani.
4. Mengetahui kendala yang dihadapi LKM-A Gapoktan Makmur Lestari dan LKM-A Gapoktan Margo Tani dalam pengelolaannya dan solusinya.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan untuk jurusan Ekonomi terutama mengenai Pengelolaan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Gapoktan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti lain, dapat berguna sebagai informasi dan bahan rujukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
- b. Bagi masyarakat, dapat berguna sebagai bahan acuan dalam memperbaiki pengelolaan LKM-A Gapoktan setempat.
- c. Bagi pemerintah dan instansi terkait, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A).

F. Sistematika Penulisan

1. Bagian Awal

Dalam bagian ini terdiri dari : halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstraksi, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari beberapa bab yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Berisikan gambaran tentang penelitian, sehingga pembaca atau penulis dapat memahami secara mudah dan jelas terhadap arah pembahasan. Pada bab pendahuluan ini dikemukakan hal-hal mengenai latar belakang masalah, penegasan istilah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penelitian skripsi.

Bab II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini mngemukakan hal-hal berkenaan dengan deskripsi pustaka meliputi : Tinjauan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A), Tinjauan tentang Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Tinjauan tentang Managemen Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dan Tinjauan tentang prinsip dasar keuangan mikro Islam.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini hal yang dikemukakan adalah jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, uji keabsahan data, dan analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan membahas hasil penelitian yang penulis lakukan secara relevan dengan permasalahan dan pembahasannya.

Bab V : Penutup

Pada akhir bab ini merupakan kesimpulan dari perumusan masalah, dan pengajuan saran-saran yang dirasa perlu dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Bagian Akhir

Dalam bab ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan penulis dan lampiran-lampiran.